



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1591 /SEK/KU.00/11/2019

12 November 2019

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pemberitahuan Perubahan Satuan Kerja Uji Petik dan  
Permintaan Dokumen

- Yth. 1. Sekretaris Pengadilan Negeri Bekasi  
2. Sekretaris Pengadilan Negeri Cikarang  
3. Sekretaris Pengadilan Negeri Depok  
4. Sekretaris Pengadilan Negeri Bogor  
Di Tempat

Menindaklanjuti Surat Ketua Tim BPK Nomor 06/Ter/PDPT/11/2019 tanggal 8 November 2019 hal Pemberitahuan Perubahan Satuan Kerja Uji Petik dan Permintaan Dokumen (terlampir), diminta kepada Saudara untuk menyiapkan sarana dan prasarana, serta dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan Terinci atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja, Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Dokumen tersebut dapat dikirimkan melalui surat elektronik/e-mail yaitu eri.indriyanti@bpk.go.id, rio.soekotjo@bpk.go.id, indri.mauluddin@bpk.go.id, dan theones.ronald@bpk.go.id dan tembusan ke Mahkamah Agung cq. Biro Keuangan bagian.akuntansi.ma@gmail.com paling lambat pada hari Jumat tanggal 22 November 2019.

Demikian untuk menjadi perhatian dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung RI,  
  
AS PUDJOHARSOYO



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat 10210 Telepon 021-25549000 Extensi 3562 Faksimile 021-5700501

---

Jakarta, 8 November 2019

Nomor : 06/Ter/PDPT/11/2019  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Pemberitahuan Perubahan Satuan  
Kerja Uji Petik dan Permintaan  
dokumen

Kepada Yth.  
**Sekretaris Mahkamah Agung**  
**di**  
**Jakarta**

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Terinci atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja, Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya di Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur dan Jawa Barat sesuai Surat Tugas Nomor 196/ST/V-XVI.1/10/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dan menindaklanjuti surat permintaan dokumen Nomor 01/Ter/PDPT/10/2019 tanggal 10 Oktober 2019 beserta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1483/SEK/KU.00/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019, maka diberitahukan bahwa satuan kerja uji petik yaitu Pengadilan Militer II - 09 Di Bandung, PTUN Bandung, PN Purwakarta, dan PN Bale Endah Bandung dialihkan menjadi PN Bekasi, PN Cikarang, PN Depok, dan PN Bogor.

Terkait perubahan dan pengalihan uji petik dalam rangka pemeriksaan tersebut, kami membutuhkan dokumen pada PN Bekasi, PN Cikarang, PN Depok, dan PN Bogor sebagaimana terlampir. Dokumen lainnya yang belum tercantum dalam surat ini akan kami mintakan kemudian dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Demikian pemberitahuan kami. Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

**Ketua Tim,**

**Rio Andalas Soekotjo**  
**NIP 198101202006041002**

**Tembusan Yth :**

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN

### Daftar Permintaan Dokumen

#### Belanja Pegawai (*Hardcopy* dan *Softcopy*)

1. Bezetting pegawai perbulan Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III) Teknis dan non Teknis; (termasuk didalamnya data SIKEP dan Komdanas backup data)
2. ADK Gaji GPP Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III)
3. Dokumen pembayaran Gaji pegawai Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III)
4. SK Pengangkatan pegawai, SPMT, SKPP Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III) Teknis dan non Teknis
5. Register dan Rekap SK Panglima TNI dan SK KMA, SK Sekma (di Dilmil dan Dilmilti) berikut dokumennya
6. Peraturan-peraturan yang terkait lainnya yang meliputi peraturan Pegawaiian seperti (Biaya mutasi, Remunerasi, pola promosi mutasi).

#### Belanja Modal (*Hardcopy* dan *Softcopy*)

1. Rencana umum pengadaan Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III)
2. Daftar Pengadaan Barang/Jasa (meliputi pelelangan/pengadaan langsung/penunjukkan langsung) pada Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III)
3. Rekapitulasi data kontrak belanja barang/jasa/modal (yang didaftarkan pada KPPN) Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III)
4. Rincian realisasi Belanja Modal Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III). **Untuk masing-masing pengadaan barang/jasa berisi informasi:**
  - a. Dokumen lelang/pengadaan langsung/penunjukkan langsung/seleksi sederhana
  - b. Dokumen pengadaan
  - c. Dokumen Penawaran Pemenang I, II, III
  - d. HPS atau *OE*
  - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
  - f. Analisa perhitungan harga satuan
  - g. Surat-surat Jaminan Pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan Uang Muka
  - h. Dokumen pembayaran (SPM)
  - i. SP2D Asli dan dokumen pendukungnya.
  - j. Surat Penunjukan Pemenang
  - k. SPMK
  - l. Kontrak, Addendum dan Justifikasi Teknik
  - m. Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian
  - n. *Back Up Data Quality* dan *Quantity*
  - o. Gambar Perencanaan (*shop drawing*)
  - p. Gambar Terpasang (*as built drawing*)
  - q. Foto dokumentasi 0% s.d posisi terakhir
  - r. Berita Acara Pemeriksaan Fisik
  - s. Berita Acara Pembayaran
  - t. BA Serah Terima, PHO dan FHO
5. Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Pengadaan (Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa termasuk Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan/Konsultansi) Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III) yang menggambarkan nama rekanan-rekanan melaksanakan kegiatan belanja modal tersebut, jangka waktu pelaksanaan, metode pengadaan, serta nilai pengadaan.
6. Daftar Pengadaan Belanja Modal dan Barang/Jasa

**Belanja Barang** (*Hardcopy* dan *Softcopy*)

1. BKU dan Buku Pembantu Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
2. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta BA Pemeriksaan Kas oleh PPK Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III)
3. Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III)
4. Surat Setoran Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III)
5. Register Pajak Penghasilan 22 (PPH 22) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan pengadaan Belanja Modal dan Barang Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III)
6. Bukti Setor/SSP PPh 22 dan PPN atas kegiatan pengadaan Belanja Barang
7. Dokumen bukti pertanggungjawaban Belanja (Laporan kegiatan, kuitansi, bukti perjalanan dinas, dst) Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III).

**Biaya Perkara** (*Hardcopy* dan *Softcopy*)

1. Laporan Keadaan Perkara bulanan dan Tahunan tahun 2018 dan 2019
2. Laporan Keuangan Perkara (penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara) Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III)
3. Rekapitulasi Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya (Biaya Eksekusi, Konsinyasi, dll) Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III).
4. Sisa panjar biaya perkara yang belum dikembalikan ke para pihak/belum disetorkan ke kas negara Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III)

PP 49 2018

\*\*\*\*\*